



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Hidayahnya jualah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuannya pada saat penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini jauh dari sempurna, oleh karenanya dengan rasa hormat kami mengharapkan koreksi dan saran untuk dapat menyempurnakan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini diperbuat, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Gunungtua, Maret 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**
SAHRIZAL, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660222 198611 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabuapten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan	40 %	32 %
		Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	8 %	8 %
		Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	20 %	0 %

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 yang dapat terealisasi pada dua Indikator Kinerja yaitu pada indikator Peningkatan Kualitas Angkutan dan Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas namun pada Indikator kinerja utama yang ke 3 yakni indikator Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan tidak dapat terealisasi karena percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid 19) yang sedang melanda dunia khususnya Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	1
B. Susunan Organisasi.....	3
C. Aspek Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2023	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	12
C. Rencana Kerja Tahun 2021	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja.....	24
B. Analisa Dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	27
C. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Simpulan Capaian Kinerja.....	42
B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	10
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2021	13
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
Tabel 2.4 Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 2.5 Anggaran Dinas Perhubungan TA. 2021	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kerja Utama.....	26
Tabel 3.3 Jumlah Angkutan yang Laik Jalan.....	27
Tabel 3.4 Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas.....	30
Tabel 3.5 Rambu-Rambu Lalu Lintas	30
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan	34
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama.....	38

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

Isu otonomi daerah merupakan isu yang sangat mempengaruhi Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan/Tataran Transportasi Lokal. Sejak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan diubah dengan UU No. 34 tahun 2004, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi didaerahnya masing-masing secara mandiri.

Di dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseluruhan aspek yang dijelaskan di atas merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah. integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat perencanaan program kegiatan yang strategic, sinergi, terukur, dan tepat sasaran serta untuk melaksanakannya memperoleh anggaran dari APBD. Anggaran dimaksud wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi tingkat capaian kinerjanya serta menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54) dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan azas perbantuan.

Adapun yang menjadi fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan Kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Pengendalian dan pengawasan teknis di Bidang Perhubungan
3. Pelaksanaan Pelayanan umum di Bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan pembinaan operasional di Bidang Perhubungan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54) dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pendapatan

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :

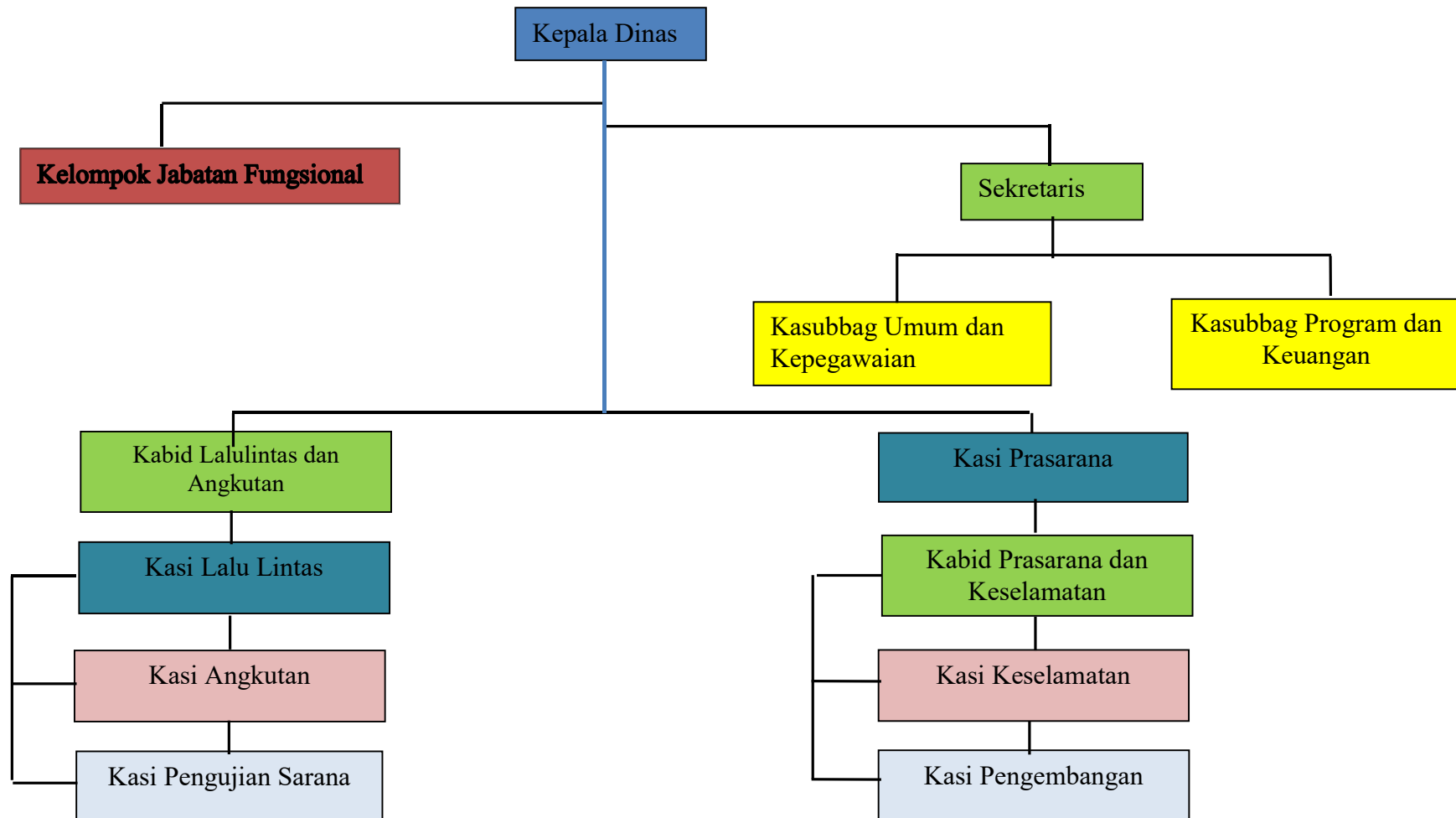
- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan
- c. Seksi Pengujian Sarana.

4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :

- a. Seksi Prasarana.
- b. Seksi Keselamatan.
- c. Seksi Pengembangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Sturuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Per Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 17 Orang terdiri dari 15 Orang Pegawai Laki-laki dan 2 Orang Pegawai Perempuan. Berikut Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Magister (S2)	0	
2	Sarjana (S1)	9	
3	Diploma III	2	
4	Diploma II	0	
5	Diploma I	1	
6	SLTA	4	
7	SLTP	1	
8	SD	0	
Jumlah		17	

2. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Gol IV	1	
2	Gol III	12	
3	Gol II	3	
4	Gol I	1	
Jumlah		17	

3. Menurut Esselosisasi

No	Esselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Esselon II	0	
2	Esselon III.a	1	
3	Esselon III.b	2	
4	Esselon IV.a	4	
Jumlah		7	

4. Menurut Jabatan

No	Esselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jabatan Struktural	7	
2	Jabatan Fungsional	0	
3	Fungsional Umum	10	
Jumlah		17	

C. ASPEK STRATEGIS

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019 - 2023 adalah:

“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT”

Dalam visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara diatas mempunyai elemen visi yang memiliki keterkaitan yang secara tidak langsung menjadi harapan dari pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam waktu 5 tahun kedepan. Keempat elemen visi Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak dapat berdiri sendiri, keempat elemen ini mempunyai hubungan yang cukup erat yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai luhur **adat** dan **keagamaan** akan tercipta masyarakat yang **cerdas** sehingga terwujud pembangunan yang **maju** dalam segala aspek pembangunandan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019 - 2023 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka dapat disimpulkan fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1 yaitu:

Misi ke 1 :Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera

Pemerintahan daerah yang demokratis dan melayani masyarakat akan mendorong terbentuknya daya saing, kreatifitas dan inovasi dengan mengandalkan keunikan daerah tersebut. Penyelenggaraan system pemerintahan yang baik harus sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Pemerintah daerah harus memberikan kinerja maksimal untuk memberikan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan.

BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019 - 2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019 - 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya RPJMD yang membuat Rencana dan Program Kerja tersebut dilaksanakan dengan tahapan yang dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, Rencana Strategis Dinas Perhubungan telah mengalami perubahan. Dasar perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara. (Penyusunan Perubahan RPJMD ini Salah satunya didasari oleh terjadi bencana nasional non alam (Pandemi Covid-19) yang sedang mewabah diseluruh Negara di Dunia dan khususnya di seluruh wilayah Indonesia).

Dalam mewujudkan target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023, perlu adanya tujuan dari Dinas Perhubungan

Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah : **Peningkatan Pelayanan Transportasi yang berkualitas**

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2019 - 2023, sebagai berikut : **Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan**

Isu Strategis Pembangunan Perhubungan meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan bidang perhubungan. Isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain :

1. Jumlah trayek dan angkutan umum yang masih kurang di Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan
3. Perlu tersedianya sarana transportasi umum yang biaya terjangkau, aman dan nyaman serta menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Perlunya penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas minim
6. Kurangnya sarana dan Prasarana perhubungan (Belum memiliki Terminal Tipe C, Belum memiliki Balai Pengujian Kendaraan bermotor)

Berikut ini Tabel Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab				
Misi : Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Pelayanan Transportasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Mewujudkan peningkatan kualitas angkutan	Meningkatkan Kinerja Layanan Angkutan	Penyediaan Angkutan Umum untuk angkutan orang/ barang
				Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi angkutan orang
		Tersedianya fasilitas perlengkapan dan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan Jumlah Fasilitas perlengkapan dan Keselamatan lalu lintas	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan
		Tersedianya sarana dan prasarana bidang Perhubungan	Meningkatkan Jumlah dan kualitas Sarana dan Prasara Perhubungan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran.

Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana kinerja yang dilaksanakan pada Rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja terlampir dalam Lampiran II Formulir RKT.

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	40%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/atau barang		1 Kegiatan	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang pada Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru		2 Kali	

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang		1 Kegiatan	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan		3 Kali	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	

				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perdesaan		2 Kali	
	Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	8%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jenis Perlengkapan Jalan yang diadakan		1 Kegiatan	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan		45 Unit	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	20%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Kegiatan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diadakan		1 Set	

C. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Penyusunan RENJA tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target realistis.

Oleh karena itu dalam RENJA ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. sehingga tujuan Dinas Perhubungan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Seseuai dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara alokasi anggaran adalah sebesar **Rp. 6.416.917.872,-**

Berikut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan TA. 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

TABEL 2.4
REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	1. Peningkatan Kualitas Angkutan	40 %
		2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	8 %
		3. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	20 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 367.367.400,-	APBD

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara., alokasi anggaran belanja Daerah sebesar **Rp. 6.416.917.872,-** dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 6.268.311.072,- terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp. 1.761.717.972,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.506.593.100,-

2. Belanja Modal sebesar Rp 148.606.800,- terdiri dari :

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 148.606.800,-
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.0

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, maupun program pendukung. Berikut ini Tabel Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.5
ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN TA. 2021

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.278.938.272
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.922.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.942.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.697.972
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.622.877.972
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.980.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	985.124.600
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	515.954.600
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.908.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270.364.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.898.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.395.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.924.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.611.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.997.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.407.700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.464.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.990.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.944.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.944.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.483.900
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.360.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.623.900
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.370.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.370.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.137.979.600
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	348.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	348.000.000
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	73.665.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	73.665.000
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.008.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.008.000.000
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	414.612.200
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	54.612.200
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	360.000.000
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	123.924.000

	Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	123.924.000
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.968.400
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114.968.400
8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.810.000
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.810.000
JUMLAH		6.416.917.872

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2021. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana

mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi capaian Kinerja}}{\% \text{ Target Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	>91	Sangat Tinggi	
2	76 > 90	Tinggi	
3	66 > 75	Sedang	
4	51 > 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan karena perubahan indikator kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang didasari terjadinya Perubahan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Padang Lawas Utara dan Perubahan Rencana Srtategis Dinas perhubungan.

Tabel 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan	40 %	32 %
		Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	8 %	8 %
		Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	20 %	0 %

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 yang dapat terealisasi pada dua Indikator Kinerja yaitu pada indikator Peningkatan Kualitas Angkutan dan Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas namun pada Indikator kinerja utama yang ke 3 yakni indikator Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan tidak dapat terealisasi karena percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid 19) yang sedang melanda dunia khususnya Indonesia,

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA**SASARAN STRATEGIS : KUALITAS PELAYANAN PERHUBUNGAN****1. Peningkatan Kualitas Angkutan**

Realisasi indikator kinerja Utama : Peningkatan Kualitas Angkutan adalah 32 % dari target 40 % atau dengan Capaian 80 % atau masuk dalam kategori **TINGGI**.

Tabel 3.3
Jumlah Angkutan yang Laik Jalan

No	Jenis Angkutan	Jumlah Angkutan	Jumlah Angkutan yang Laik Jalan
1	Angkutan Orang	200 Unit	64 Unit
2	Angkutan Barang	30 Unit	10 Unit

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara

Pencapaian Tersebut diperoleh dari presentasi jumlah Angkutan yang laik jalan dibagi dengan target Angkutan laik jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara . Target Angkutan yang laik jalan sebesar 230 Unit sedangkan angkutan yang laik jalan sebesar 74 Unit. Terdiri dari 64 unit angkutan orang dan 10 unit angkutan barang.

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini adalah Kabupaten Padang Lawas belum memiliki Balai pengujian kendaraan bermotor sehingga banyak pengusaha angkutan yang tidak melakukan pengujian terhadap angkutan yang mereka miliki apakah laik untuk jalan atau tidak laik jalan. Akan tetapi sebagian pengusaha angkutan melakukan pengujian kendaraan ke Kabupaten terdekat sekitar Kabupaten Padang Lawas Utara dengan meminta rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang perhubungan masih sangat minim.

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

1. Anggaran untuk Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga para pengusaha angkutan

tidak perlu melakukan pengujian kendaraan ke Kabupaten Lain yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Memberi Kesempatan kepada ASN untuk mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap Tahunnya

Gambar Pemantauan Angkutan Orang/Barang



Gambar Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang



2. Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Dan Keselamatan Lalu Lintas

Realiasi indikator kinerja Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas adalah 8% dari target 8 % atau dengan Capaian 100 % atau masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Pada indikator ini yang tercapai adalah pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Pada Tahun 2021 Jumlah jenis Perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas yang ditargetkan adalah 1 jenis sebanyak 45 unit.

Tabel 3.4
Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas
Tahun 2021

No	Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas	Target	Realiasi
1	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	45 Unit	45 Unit

Sumber Data : Bidang Sarana dan Keselamatan

Tabel 3.5
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	LOKASI
1	2	3	4	5
1	RAMBU TANDA TIKUNGAN KANAN	1	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)
2	RAMBU TANDA TANJAKAN TAJAM BERSELOK	3	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)
3	RAMBU TANDA TURUNAN TAJAM BERBELOK	3	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)
4	RAMBU TANDA PERSIMPANGAN 3	2	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)
5	RAMBU TANDA HATI-HATI	3	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)
6	RAMBU TANDA TIKUNGAN KE KIRI	1	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)

7	RAMBU TANDA PRIORITAS UTAMA (SEGI TIGA TERBALIK)	2	UNIT	TANJUNG SIRAM-KE HAJORAN (2 Arah Bolak-Balik)
8	RAMBU TANDA TIKUNGAN KANAN	2	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
9	RAMBU TANDA TIKUNGAN KIRI	2	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
10	RAMBU TANDA PERSIMPANGAN 3	1	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
11	RAMBU TANDA HATI-HATI	2	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
12	RAMBU TANDA MESJID	1	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
13	RAMBU TANDA ANAK SEKOLAH	1	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
14	RAMBU TANDA PRIORITAS UTAMA (SEGI TIGA TERBALIK)	1	UNIT	AEK HARUAYA-KE GUNUNG BARINGIN (2 Arah Bolak-Balik)
15	RAMBU TANDA TIKUNGAN KANAN	2	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
16	RAMBU TANDA TIKUNGAN KE KIRI	1	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
17	RAMBU TANDA TANJAKAN TAJAM BERBELOK	1	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
18	RAMBU TANDA TURUNAN TAJAM BERBELOK	1	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
19	RAMBU TANDA PERSIMPANGAN 3	3	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
20	RAMBU TANDA TIKUNGAN GANDA	2	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
21	RAMBU TANDA HATI-HATI	2	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
22	RAMBU TANDA ANAK SEKOLAH	1	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG

				(2 Arah Bolak-Balik)
23	RAMBU TANDA MESJID	1	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
24	RAMBU TANDA JEMBATAN SEMPIT	4	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
25	RAMBU TANDA PRIORITAS UTAMA (SEGI TIGA TERBALIK)	2	UNIT	SIP.HUTABARU-KE HUTA BARU-MANGALEDANG (2 Arah Bolak-Balik)
JUMLAH KESELURUHAN		45	UNIT	

Gambar Rambu-rambu lalu lintas



Untuk mencapai indikator Persentase Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan Lalu lintas Pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara merencanakan pengadaan Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas sebanyak 1 Jenis yaitu Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas sebanyak 45 unit sesuai dengan Renja Tahun 2021.

Permasalahan yang dihadapi adalah

1. Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan yang sangat banyak dalam rangka penataan Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Keterbatasan anggaran.

Solusi/ upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapai indikator ini yaitu :

1. Merencanakan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan secara detail dengan membuat kajian kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Memilah kebutuhan yang lebih penting sehingga pada akhirnya kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan tersebut dapat terpenuhi.

3. Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Pada tahun 2021 tidak ada realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama Peningkatan Sarana dan Prasana Perhubungan hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten padang Lawas Utara, sebagian anggaran direfocusing yang peruntukannya untuk penanganan wabah Covid-19 yang masih melanda seluruh dunia. Dimana **kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** telah dianggarkan sebesar Rp.199.250.000,- pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD TAHUN 2021) juga mengalami refocusing anggaran.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indikator dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

TABEL 3.6
REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.278.938.272	4.053.766.649	95,98	225.171.623
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.922.000	12.922.000	100,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.942.000	7.942.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000	4.980.000	100,00	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.766.697.972	1.635.377.128	94,54	131.320.844
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.622.877.972	1.504.157.128	92,68	118.720.844
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.840.000	126.240.000	90,92	12.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.980.000	4.980.000	100,00	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	985.124.600	970.964.000	98,56	14.160.600
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	515.954.600	507.722.000	98,40	8.232.600
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.908.000	158.340.000	99,64	568.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270.364.000	265.076.000	98,04	5.288.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.898.000	39.826.000	99,82	72.000
4	Administrasi Umum				

	Perangkat Daerah	692.395.800	663.277.700	95,79	29.118.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.924.600	11.020.000	92,41	904.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.611.700	101.275.700	91,56	9.336.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.997.800	14.834.000	98,91	163.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	70.000.000	100,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.407.700	76.309.000	93,74	5.098.700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.464.000	31.464.000	100,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.990.000	358.375.000	96,34	13.615.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.944.000	57.798.000	96,42	2.146.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.944.000	57.798.000	96,42	2.146.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.483.900	423.387.515	95,47	20.096.385
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.360.000	32.133.615	62,57	19.226.385
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.623.900	386.753.900	99,78	870.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.370.000	290.040.306	91,10	28.329.694
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.370.000	290.040.306	91,10	28.329.694

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.137.979.600	2.117.337.600	99,34	20.642.000
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	348.000.000	347.734.000	99,92	266.000
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	348.000.000	347.734.000	99,92	266.000
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	73.665.000	73.000.000	99,10	665.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	73.665.000	73.000.000	99,10	665.000
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.008.000.000	995.308.000	98,74	12.692.000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.008.000.000	995.308.000	98,74	12.692.000
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	414.612.200	408.127.200	98,44	6.485.000
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	54.612.200	54.511.200	99,82	101.000
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	360.000.000	353.616.000	98,23	6.384.000
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	123.924.000	123.780.000	99,88	144.000

	Kabupaten/Kota				
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	123.924.000	123.780.000	99,88	144.000
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.968.400	114.938.400	99,97	30.000
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114.968.400	114.938.400	99,97	30.000
8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.810.000	54.450.000	99,34	360.000
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.810.000	54.450.000	99,34	360.000
JUMLAH		6.416.917.872	6.171.104.249	97,66	245.813.623

TABEL 3.7
REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Kualitas Kualitas Angkutan	40%	32%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	367.367.400	366.168.400	99,57	1.199.000	
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	123.924.000	123.780.000	99,88	144.000	
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	123.924.000	123.780.000	99,88	144.000	
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.968.400	114.938.400	99,97	30.000	

				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114.968.400	114.938.400	99,97	30.000	
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.810.000	54.450.000	99,34	360.000	
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.810.000	54.450.000	99,34	360.000	
				Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas					
		8%	8%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	73.665.000	73.000.000	99,1	665.000	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	73.665.000	73.000.000	99,1	665.000	
		20%	0%	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	
				Peningkatan Jumlah Sarana dan					

		Prasarana Perhubungan			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	
JUMLAH						367.367.400	366.168.400	99,57	1.199.000	

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 60 %, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 99,57 %. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp. 4.278.938.272,- dan terealisasi sebesar Rp 4.053.766.649,- dengan persentase 95,98 %. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 2 program dengan 14 kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 97,66%.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa dari 3 indikator kinerja utama ada dua indikator kinerja yang mencapai target yaitu Peningkatan Kualitas Angkutan sebesar 32 % dari target 40 % atau mencapai 80 % (tinggi), Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas juga mencapai realisasi 8% dari target 8 % atau mencapai 100 % (sangat tinggi) dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan tidak dapat teralisasi disebabkan terjadinya wabah COVID-19 yang melanda dunia khususnya indonesia, dimana sebagian besar anggaran difocusing untuk percepatan penanganan wabah tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk dapat dalam pelaksanaan tugas, baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Dukungan yang belum sepenuhnya dari para Pengusaha Angkutan
- b. Minimnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas
- c. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang kompeten
- d. Minimnya sarana dan prasarana perhubungan (Kabupaten Padang Lawas Utara Tidak memiliki Terminal Tipe C, dan Balai Pengujian Kendaraan bermotor).
- e. Masih rendahnya kesadaran pihak penyedia jasa angkutan tentang kendaraan yang laik jalan


B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan
- Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana perhubungan dapat berfungsi dengan baik.
- Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan serta perencanaan kegiatan perhubungan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.
- Melakukan Sosialisasi kepada para Pengusaha angkutan orang/ barang
- Mengajukan anggaran untuk penyediaan perlengkapan Jalan dan Keselamatan lalu lintas tahun berikutnya
- Mengajukan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini dibuat, semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan mendukung mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab.

Gunungtua, Maret 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SAHRIZAL, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660222 198612 1 001